



Judul : Komisi I DPR RI tepis anggapan pertahankan "Pasar Karet" di revisi UU ITE
Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
Surat Kabar : TV ONE
Halaman : 3

Proses Legislasi

Komisi I DPR RI Tepis Anggapan Pertahankan "Pasal Karet" di Revisi UU ITE

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menepis anggapan komisinya menggelar beberapa kali rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) secara tertutup lantaran ingin mempertahankan "pasal karet".

"Jadi saya mohon maaf (beberapa kali dilakukan tertutup) karena ada sebagian salah persepsi ini mau anu, mau mempertahankan 'pasal karet', eng-

gak ada, kita justru semangat bagaimana tidak terjadi pasal yang sering dikatakan 'pasal karet' itu," kata Abdul dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk mendengarkan masukan mengenai revisi UU ITE, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Sebaliknya, dia menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI beberapa kali melangsungkan rapat pembahasan revisi UU ITE karena sedang mencoba menguji pasal-pasal yang hendak direvisi dengan sejumlah isu sensitif.

"Beberapa kali rapat kita me-

ng kita buat secara tertutup untuk kekeluasan kami membahas, meng-exercise (menguji) dengan isu-isu yang sensitif, yang kiranya kalau misalnya terakam segala macam tidak membuat masalah," ujarnya.

Sebab, dia mengaku khawatir apabila bahasan revisi UU ITE yang dikaitkan dengan sejumlah isu sensitif menyangkut hal mendetail tersebut dilakukan secara terbuka maka berpotensi memunculkan penyalahgunaan informasi.

"Jadi rapat ditutup bukan untuk tujuan gimana-gimana, bukan, tapi untuk melindungi

agar tidak disalahgunakan pembahasan dalam rapat itu, tidak ada perekaman terhadap contoh ini kasus begini, 'Ayat ini kalau diterapkan ini bagaimana?', pasti kejaksan ataupun kepolisian akan, 'Oh ini contoh kasusnya ini waktu itu begini, begini, begini,' detail. Nah, ini enggak bisa rapat secara terbuka," tuturnya.

Terlebih, lanjut dia, kondisi saat ini merupakan tahapan jelang Pemilu 2024 sehingga kekhawatiran akan penyalahgunaan informasi yang tidak utuh oleh pihak-pihak tertentu akan semakin rentan. "Karena

misalnya direkam terus dipotong disebarluaskan mau penilu lagi, hancur itu nama anggota yang usul misalnya, yang membahas itu. Jadi sifatnya adalah kadang mengambil contoh yang menyebut kasus dan lain sebagainya," katanya.

Abdul pun menekankan bahwa Komisi I DPR RI dalam melakukan pembahasan revisi kedua UU ITE kali ini berupaya agar norma dan rumusan yang dihasilkan tidak berpotensi menjadi "pasal karet" dan mengulang kembali apa yang telah dilakukan pada revisi pertama UU ITE. ■ **Ant/S-2**